

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR FAJAR WARAPASTIKA
TAHUN 2025**



**Jl. Raya Lintas Timur No. 244 Labuhan Ratu I
Way Jepara, Lampung Timur
TELEPON: 0725 7648989**

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT. BPR FAJAR WARAPASTIKA
Alamat	Jln. Raya Lintas Timur No. 244 Labuhan Ratu I Way Jepara, Lampung Timur 34396
Nomor Telepon	(0725) 7648989

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Fajar Warapastika pada tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

PT. BPR Fajar Warapastika memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT. BPR Fajar Warapastika dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Lampung Timur. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT. BPR Fajar Warapastika didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan PT. BPR Fajar Warapastika.

PT. BPR Fajar Warapastika telah beroperasi lebih dari 33 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi Bank Perekonomian Rakyat yang peduli dan siap memberi solusi keuangan masyarakat Lampung.

Dalam penerapan Tata Kelola, PT. BPR Fajar Warapastika selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, PT. BPR Fajar Warapastika terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan

prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Aditha Wibowo
	NIK	1871020901800004
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:		
a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku		
b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank		
c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.		
d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.		
e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.		
f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.		
2.	Nama	Aisyah Armitha
	NIK	1807074308970003
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur YMF Kepatuhan adalah sebagai berikut:		
a. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan.		
b. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang		
c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain		
d. Memantau dan menjaga kegiatan usaha BPR agar tidak menyimpang dari ketentuan		
e. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain		
f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan terkait dengan Ketentuan OJK yang terbaru.		

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan

Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT. BPR Fajar Warapastika.

d. Temuan pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti

e. Semua temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Wati Rahmi Ria
	NIK	1871134904650002

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank
- Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan
- Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.
- Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.

2.	Nama	Rusdi Said
	NIK	1871020906450001

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank
- Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan
- Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas (Otoritas Jasa Keuangan) dan Instansi lainnya.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
- Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan

reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT. BPR Fajar Warapastika.

d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan < 30 hari agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat sehingga kredit tidak jatuh pada kolektibilitas 2.

e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti.

f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan

g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Aditha Wibowo
	NIK	1871020901800004
	Persentase Kepemilikan (%)	1,55
2.	Nama	Aisyah Armitha
	NIK	1807074308970003
	Persentase Kepemilikan (%)	1,55

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Wati Rahmi Ria
	NIK	1871134904650002
	Persentase Kepemilikan (%)	92,30
2.	Nama	Rusdi Said
	NIK	1871020906450001
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan saham anggota Direksi dan dewan komisaris pada BPR telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan telah dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0073463.AH.01.02. Tahun 2024.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Aditha Wibowo
	NIK	1871020901800004
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Aisya Armitha
	NIK	1807074308970003
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Wati Rahmi Ria
	NIK	1871134904650002
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Rusdi Said
	NIK	1871020906450001
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Aditha Wibowo
	NIK	1871020901800004
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Aisya Armitha
	NIK	1807074308970003
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Wati Rahmi Ria
	NIK	1871134904650002
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Rusdi Said
	NIK	1871020906450001
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Aditha Wibowo
	NIK	1871020901800004
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada

	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Aisya Armitha
	NIK	1807074308970003
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Wati Rahmi Ria
	NIK	1871134904650002
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Rusdi Said
	NIK	1871020906450001
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Aditha Wibowo
	NIK	1871020901800004
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Aisya Armitha
	NIK	1807074308970003
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Wati Rahmi Ria
	NIK	1871134904650002
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Rusdi Said
	NIK	1871020906450001

Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp632.491.200
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp386.522.400

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp19.200.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp19.200.000

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp52.708.000
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp32.210.500

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Remunerasi telah sesuai dengan hasil RUPS

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah	
Rasio (a/b)	2,49 : 1
2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah	
Rasio (a/b)	1,25 : 1
3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	
Rasio (a/b)	2,14 : 1
4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	
Rasio (a/b)	1,33 : 1
5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi	
Rasio (a/b)	3,87 : 1

Rasio gaji pegawai dibayarkan sudah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan jumlah pekerja pada BPR.

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	02 Januari 2025
	Jumlah Peserta	42 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi hasil kinerja keuangan BPR tahun 2024	
2.	Tanggal Rapat	22 Januari 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Persiapan RUPST Tahun buku 2024, Grading dan Penggajian Karyawan 2025, dan penarikan Linkage	
3.	Tanggal Rapat	03 Maret 2025

	Jumlah Peserta	42 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	Evaluasi hasil kinerja keuangan BPR bulan Februari 2025
4.	Tanggal Rapat	08 April 2025
	Jumlah Peserta	42 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	Evaluasi kinerja keuangan BPR bulan Maret 2025
5.	Tanggal Rapat	16 April 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	Evaluasi hasil kinerja keuangan triwulan I dan Evaluasi Penggunaan Jasa KAP 2024
6.	Tanggal Rapat	02 Mei 2025
	Jumlah Peserta	42 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	Evaluasi kinerja keuangan BPR bulan April 2025
7.	Tanggal Rapat	07 Mei 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	Penawaran Vendor pembangunan ruang lantai 3
8.	Tanggal Rapat	02 Juni 2025
	Jumlah Peserta	42 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	Evaluasi kinerja keuangan BPR bulan Mei 2025
9.	Tanggal Rapat	01 Juli 2025
	Jumlah Peserta	42 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	Evaluasi Kinerja Keuangan BPR bulan juni 2025
10.	Tanggal Rapat	11 Juli 2025

	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Pembentukan CKPN individual, Kriteria, Perhitungan dan Implementasinya	
11.	Tanggal Rapat	30 Juli 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Hasil kinerja Triwulan II, rencana penjualan aset kendaraan roda empat, dan lain-lain	
12.	Tanggal Rapat	01 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	16 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Sharing Knowledge kebijakan perkreditan	
13.	Tanggal Rapat	12 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Penambahan tenaga kerja bagian funding dengan sistem freelance	
14.	Tanggal Rapat	21 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	9 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi penyampaian laporan keuangan BPR	
15.	Tanggal Rapat	01 September 2025
	Jumlah Peserta	42 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Kinerja Keuangan BPR bulan Agustus 2025	
16.	Tanggal Rapat	11 September 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi hasil pemeriksaan OJK	
17.	Tanggal Rapat	17 September 2025

	Jumlah Peserta	5 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi hasil pemeriksaan OJK	
18.	Tanggal Rapat	01 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	43 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Kinerja keuangan BPR bulan September 2025	
19.	Tanggal Rapat	29 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Triwulan III dan rencana penyusunan RBB	
20.	Tanggal Rapat	03 November 2025
	Jumlah Peserta	43 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Kinerja Keuangan BPR bulan Oktober 2025	
21.	Tanggal Rapat	29 November 2025
	Jumlah Peserta	8 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan RBB 2026	
22.	Tanggal Rapat	01 Desember 2025
	Jumlah Peserta	43 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi kinerja keuangan BPR bulan November 2025	

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Wati Rahmi Ria
	NIK	1871134904650002

	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	8 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Rusdi Said
	NIK	1871020906450001
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Apabila terdapat anggota dewan komisaris yang tidak hadir dalam rapat maka, hasil rapat akan disampaikan pada kesempatan berikutnya baik secara langsung ataupun dengan memberikan copy-file risalah rapat, sehingga hasil keputusan rapat tetap dapat tersampaikan kepada seluruh dewan pengurus BPR.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Pada tahun 2025, tidak terdapat penyimpangan Internal (internal Fraud).

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

Tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi pada tahun laporan (Nihil)

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan penerapan tata kelola BPR, pada periode tahun 2025 tidak ditemukan adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan usaha BPR.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Dalam hal kontribusi BPR terhadap kegiatan sosial di lingkungan kerja BPR, BPR telah melakukan dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial di wilayah kerja kantor BPR seperti perayaan HUT RI, perayaan hari jadi desa, kegiatan agama di masjid dan lain-lain yang ada di sekitar wilayah kantor bank fajar.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR Fajar Warapastika untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Way Jepara, 03 Maret 2026

PT BPR Fajar Warapastika



Aditha Wibowo
Direktur Utama



Wati Rahmi Ria
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
SEMESTER II TAHUN 2025

Nama BPR : PT BPR Fajar Warapastika
Alamat : Jl. Raya Lintas Timur No. 244 Way Jepara, Lampung Timur
Nomor Telepon : 0725.7648989
Posisi Laporan : Semester II Tahun 2025
Modal Inti : Rp13.411.819.300
Total Aset : Rp71.364.784.544

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 2 (Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Tidak Dinilai
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik



Kesimpulan
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
Faktor Positif
1) Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan; 2) BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan; 3) Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR dinilai memadai; 4) Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR dinilai memadai; 5) Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai memadai; 6) Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR dinilai memadai; 7) Implementasi hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi di BPR menunjukkan kondisi memadai; 8) Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan penilaian memadai
Faktor Negatif
BPR Fajar Warapastika secara keseluruhan berdasarkan penilaian tidak terdapat faktor negatif atau nihil

Way Jepara, 28 Januari 2026

PT BPR Fajar Warapastika



Aditha Wibowo
Direktur Utama



Wati Rahmi Ria
Komisaris Utama

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
PT BPR Fajar Warapastika Semester II Tahun 2025**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR Fajar Warapastika selama semester II tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Way Jepara, 28 Januari 2026

PT BPR Fajar Warapastika



Adittha Wibowo
Direktur Utama



Wati Rahmi Ria
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Fajar Warapastika

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1040241-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-602022-06032026112723

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

aisya.armitha@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-03-06 11:27:23



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.